

ABSTRAK

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) bertujuan menciptakan perlindungan hukum bagi bidang tanah di Indonesia. Kantor pertanahan sebagai penyelenggara umumnya memiliki kewenangan untuk menyerahkan sertipikat tanah hasil PTSL. Namun, kewenangan tersebut telah dilalaikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur dengan menolak permintaan penyerahan sertipikat tanah milik Gereja Bethany Indonesia. Penolakan tersebut, menimbulkan ketidakpastian hukum atas status objek sengketa. Penulisan hukum ini bertujuan untuk memahami serta menganalisis kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur mengenai penyerahan sertipikat tanah melalui program PTSL sesuai dengan peraturan yang berlaku serta pertimbangan hakim atas tindakannya jika ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (Studi Putusan PTUN No 27/G/TF/2021/PTUN.SMD). Metode penelitian yang dikenakan dalam penulisan hukum ini yaitu *yuridis normatif* dengan pendekatan perundang-undangan serta doktrinal. Dengan demikian, penulisan hukum ini akan mengkaji permasalahan dengan data sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis mengenai gambaran penyelenggaraan PTSL hingga kewenangan kantor pertanahan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tidak menjalankan kewenangannya sebagaimana mestinya sebab tidak menyelenggarakan PTSL secara sistematis. Sehingga telah melanggar Pasal 30 Ayat (1) huruf b serta 31 Ayat (2) dan (3) PP 24/1997 serta melalaikan landasan penyelenggaraan wewenang alat administrasi negara yakni AAUPB pada asas kepastian hukum dan kecermatan.

Kata Kunci: *PTSL, Kewenangan, Kantor Pertanahan.*

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration (PTSL) program aims to create legal protection for land parcels in Indonesia. The land office as the organizer generally has the authority to hand over land certificates resulting from PTSL. However, this authority was neglected by the East Kutai District Land Office by refusing a request to hand over land certificates belonging to the Bethany Indonesia Church. This refusal creates legal uncertainty over the status of the object of dispute. Writing this law aims to understand and analyze the authority of the Land Office of East Kutai Regency regarding the submission of land certificates through the PTSL program in accordance with applicable regulations and the judge's consideration of his actions when viewed from the General Principles of Good Governance (AAUPB) (PTUN Decision Study No. 27 /G/TF/2021/PTUN. SMD). The research method used in writing this law is normative juridical with statutory and doctrinal approaches. Thus, writing this law will examine the problems with secondary data presented in an analytical descriptive manner regarding the description of the implementation of PTSL to the authority of the land office. The results of this study indicate that the East Kutai District Land Office did not exercise its authority properly because it did not carry out the PTSL stages systematically. So that it has violated Article 30 Paragraph (1) letter b and 31 Paragraph (2) and (3) PP 24/1997 and neglected the basis for implementing the authority of the state administrative apparatus namely AAUPB on the principle of legal certainty and accuracy.

Keywords: *PTSL, Authorities, Land Office.*